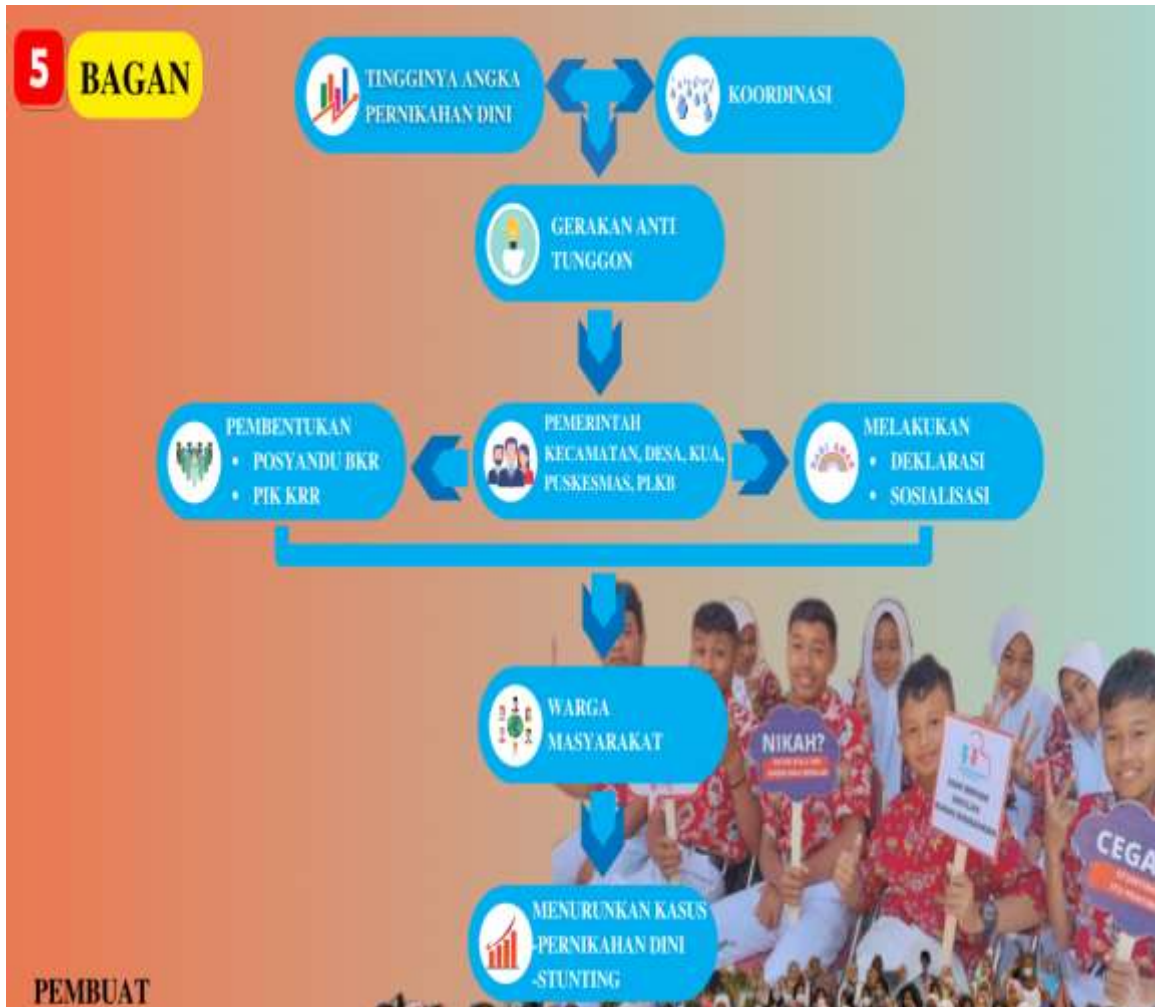


BAB II

A. ALUR GERAKAN ANTI TUNGGON



B. DESKRIPSI ALUR GERAKAN ANTI TUNGGON

Dengan tingginya angka pernikahan dini di kecamatan karangtengah kabupaten wonogiri membuat pemerintah berupaya menurunkan pernikahan dini dengan melakukan koordinasi bersama instansi terkait, dalam koordinasi tersebut di hadiri oleh forkompimcam kecamatan karantengah, kepala sekolah menengah pertama se kecamatan karangtengah, kepala puskesmas kecamatan karangtengah, kepala kantor urusan agama kecamatan karangtengah, kepala desa sekecamatan karangtengah, koordinator plkb kecamatan karangtengah dan peserta dari dinas instansi terkait,

dalam koordinasi tersebut muncullah ide yang pertama adalah “GERAKAN ANTI TUNGGON” yang kedua kurangnya fasilitas pendidikan di kecamatan karangtengah, fasilitas pendidikan di kecamatan karangtengah paling tinggi adalah sekolah menengah pertama (SMP.) karena belum adanya fasilitas sekolah menengah atas (SMA) dan jauhnya akses adalah faktor berikutnya yang membuat kasus pernikahan dini di kecamatan karangtengah dalam hal ini pemerintah berupaya mengusulkan pengadaan fasilitas dan pembangunan Sekolah menengah tingkat atas (SMA) namun untuk sementara baru bisa mengadakan sekolah kejar paket C setingkat sekolah menengah atas (SMA).

Setelah disepakati gerakan anti tunggon kemudian forkompimcam dan kepala desa sekecamatan karangtengah, beserta dinas terkait mendeklarasikan dengan penanda tanganan deklarasi anti tunggon di kecamatan karangtengah. Kemudian segenap pemerintah kecamatan karangtengah dari unsur pemerintah kecamatan, pemerintahan desa, dan dinas terkait bersama-sama melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat di kecamatan karangtengah untuk melarang tunggon, dengan upaya pemerintah tersebut bias menurunkan kasus pernikahan denim dan stunting di kecamatan karangtengah